HISTORIA VITAE
Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

HISTORIA VITAE, *Vol. 02, No.02, Oktober 2022*

PERANAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PDRI 1948-1949

Mutiara Putri Fitria
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
mutiarap885@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pihak Belanda diwakili oleh Dr. L.J. Beel menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville. Sehingga melakukan Agresi Militer II (operasi gagak) ini terjadi pada 19 Desember 1948 pukul 05.30 dengan melakukan penyerangan terhadap ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia di Yogyakarta saat itu. Maka penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis empat permasalahan pokok yaitu : (1) Latar Belakang Berdirinya PDRI; (2) PDRI: Antara Mandat dan Kecerdasan Syafruddin Prawiranegara; (3) Perjalanan Singkat PDRI; dan (4) Akhir dari PDRI. Pendekatan dalam penulisan menggunakan cara deskriptif analitis sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi dan penulisan sejarah. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa (1) Latar belakang PDRI atas dasar menyelamatkan dan mempertahankan proklamasi yang telah diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia. (2) PDRI : antara mandat dan kecerdasan Syafruddin Prawiranegara mesti bergerilya dituntut memiliki mobilitas yang tinggi dengan berpindah-pindah kedudukannya dalam menghindari serangan lawan sehingga pengambilan keputusan mesti cepat dan tepat. (3) Perjalanan singkat PDRI yang krusial ini menarik simpati dunia luar sehingga dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada 28 Januari 1949. (4) Akhir dari PDRI ditandai Perjanjian Roem-Roijen kemudian pada penyerahan mandat dari PDRI ke Moh. Hatta pada tanggal 14 Juli 1949.

Kata Kunci: Syafruddin Prawiranegara, Gerilya, Eksistensi Indonesia.

ABSTRACT

The Dutch side Dr. L.J. Beel stated that the Netherlands was no longer bound by the Renville Agreement. So that the second military aggression (operation crow) occurred on December 19, 1948 at 05.30 by attacking the capital city of the Unitary State of the Republic of Indonesia in Yogyakarta at that time. So the writing of this journal article aims to describe and analyze four main problems, namely: (1) Background to the Establishment of PDRI; (2) PDRI: The Mandate and Intelligence of Syafruddin Prawiranegara; (3) PDRI Short Trip; and (4) End of PDRI. The approach in writing uses descriptive analytical sources, verification (source criticism), interpretation and historical writing. The results of this paper indicate that (1) The background of the PDRI on the basis of saving and defending the proclamation that has been fought for by the entire Indonesian nation. (2) PDRI: between the mandate and intelligence of Syafruddin Prawiranegara, guerrillas are required to have high mobility by moving from position to position in avoiding opponent attacks so that decision making must be fast and precise. (3) This crucial short trip of PDRI attracted the sympathy of the outside world so that the UN security council issued a resolution on January 28, 1949. (4) The end of PDRI was marked by the Roem-Roijen Agreement and then the handing over of the mandate from PDRI to Moh. Hatta on July 14, 1949.

Keywords: *Syafruddin Prawiranegara, Guerrilla, Indonesian Existence.*

PENDAHULUAN

Syafruddin Prawiranegara merupakan negarawan yang ahli dalam bidang hukum, keuangan, dan agama. Realitanya pada masa revolusi cekaman dari sekutu (Inggris), Belanda, dan Jepang masih membayangi dalam tatanan pemerintahan Indonesia selepas merdeka. Selain itu, tantangan dari dalam mesti dihadapi seperti pemberontakan PKI di Madiun. Sehingga fokus pemerintahan Republik Indonesia dipusatkan dahulu untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Padahal pada masa itu Indonesia sedang melakukan delegasi dengan Belanda mengenai Persetujuan Renville yang menemui jalan buntu. Berdampak adanya Agresi Militer II sebelumnya telah diprediksi oleh para pemimpin bangsa. Sebab ambisi Belanda untuk kembali meduduki Indonesia terlihat nyata ketika kedatangan NICA dengan membonceng sekutu. Agresi Militer II (operasi gagak) ini terjadi pada 19 Desember 1948 pukul 05.30 dengan melakukan penyerangan terhadap ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia di Yogyakarta saat itu.

Tujuan pelaksanaan Agresi Militer II yaitu melumpuhkan pemerintahan secara resmi dengan melakukan penawanan Soekarno dan Moh. Hatta. Sehingga keduanya tidak memiliki hak atas jabatannya, sebab berada dalam tawanan perang tentara Belanda. Namun, para pemimpin bangsa ini mampu membaca siasat pergerakan Belanda saat itu, sehingga pembentukan pemerintah darurat telah direncanakan. Pemanfaatan radio ini sangat berarti ditunjukkan ketika presiden dan wakil presiden ditawan mengeluarkan mandat melalui radio kepada Syafruddin Prawiranegara. Akan tetapi, pada masa yang cukup genting jaringan komunikasi antara Yogyakarta dan Bukit tinggi ini dimusnahkan oleh Belanda agar aksi kudetanya terlaksana.

Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibentuk bukan sebagai bentuk separatisme, melainkan sebuah kebutuhan mempertahankan eksistensi Indonesia untuk tetap merdeka, bersatu, dan berdaulat. Maka, Prof. Dr. Sartono Kartodidjo menyatakan Pemerintah Darurat Republik Indonesia yaitu soal *to be or not to be* yang mengartikan ada tidaknya Indonesia saat itu bergantung dari eksistensi PDRI[1]. Namun, faktanya Syafruddin Prawiranegara ini kurang dikenal oleh warga negara Indonesia. Padahal beliau berjuang dengan berbagai cara agar Belanda tidak dapat memperoleh kemenangan militer. Strategi yang digunakan baik berupa diplomasi maupun aksi gerilya. Kegiatan diplolasi yang dilaksanakan A.N Palar di dunia internasional dan gerilya yang dipimpin Jenderal Soedirman. Dalam menjalani aksi baik diplomasi dan gerilya Syafruddin Prawiranegara memastikan tersebut melalui radio. Kedua cara tersebut ditempuh untuk menunjukkan eksistensi Indonesia.

Bagi Syafruddin Prawiranegara eksistensi dan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia tidak terlatak pada Soekarno dan Moh. Hatta. Meskipun kedua tokoh sebenarnya sangat berarti bagi bangsa Indonesia sebagai simbol dari persatuan bangsa. Dengan pandangan tersebut, perjuangan tetap harus dilanjutkan meskipun mereka berdua telah ditangkap dan ditawan oleh Belanda. Memunculkan visi kenegarawanan para pemimpin bangsa khususnya elit politik mendasari pembentukan PDRI segera diwujudkan sebab ambisi Belanda untuk mengubur negara Indonesia itu nyata melalui Agresi Militer II. Dengan penuh tanggung jawab Syafruddin Prawiranegara dan kawan-kawan dapat menyelamatkan aksi brutal tentara Belanda.

[1] Djaja Wahjudi, *PDRI*, Klaten, Cempaka Putih, 2008, hlm.33.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini ditulis menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan metode sejarah melalui lima tahapan antara lain pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah. Adapun pengumpulan sumber dengan membaca buku dan mengakses artikel jurnal ilmiah. Sumber yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan berbagai informasi dan fakta. Informasi yang diperoleh diinterpretasikan sebagai narasi yang dipaparkan dalam artikel dapat memberikan ganbaran secara ringkas dan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Berdirinya PDRI

Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibentuk pada 22 Desember 1948 sebagai reaksi atas Agresi Militer II yang dilakukan Belanda atas ibu kota Yogyakarta. Pemilihan pendirian pemerintahan darurat di Sumatera atas pertimbangan wilayahnya lebih luas dibanding Pulau Jawa sebagian besar masih berupa hutan rimba yang lebat sehingga wilayahnya ideal untuk aktivitas gerilya. Pendirian PDRI ini atas dasar menyelamatkan dan mempertahankan proklamasi yang telah diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia. Dalam pemerintahan darurat ini situasi dan kondisi sangat tidak stabil, sehingga pelaksanaan pemerintahan harus bergerilya dan berpindah-pindah. Syafruddin Prawiranegara termasuk elit politik pada masa itu yang memiliki pribadi nasionalisme yang tinggi terbukti dalam situasi yang mendesak demikian tidak ada keinginan untuk mendirikan negara sendiri di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun kesempatan terbuka luas untuk melakukan tindakan separatisme, namun mereka tetap berjuang demi tegaknya negara Indonesia yang telah dibentuk bersama. Dipilihnya beliau menjadi pemipin PDRI, atas pertimbangan Syafruddin Prawiranegara yang cakap dan paling cepat bergerak serta dapat memegang amanah dengan baik. Sedangkan pada masa itu Syafruddin Prawiranegara dengan usia yang terbilang cukup muda mesti melaksanakan suatu jabatan dan tanggung jawab yang harus dipikulnya saat berusia 37 tahun.

Pada pertengahan Desember 1948 Indonesia dan Belanda sedang melaksanakan perundingan di Kaliurang, Yogyakarta dengan difasilitasi Komisi Tiga Negara. Dapat ditinjau dukungan diplomatik kerap dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia yang menunjukkan diri antikomunis, sehingga pantas mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Pada saat itu terlaksana perundingan tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan hasil-hasil dari Perundingan Renville. Secara terang-terangan Belanda dalam pelaksanaan perundingan tersebut menunjukkan sikap mengulur-ngulur waktu sehingga memacetkan proses perundingan. Pokok permasalahan dalam perundingan tersebut yakni proses peralihan menjelang lahirnya Negara Indonesia Serikat[2]. Selain itu Belanda menuntut pemerintahan Indonesia mengakui kedaulatan Belanda pada masa peralihan dan membentuk polisi bersama Indonesia-Belanda (*Gendarmerie*). Akan tetapi, bagi pemerintahan Indonesia itu menghilangkan TNI sebab bergabung dengan polisi bersama tersebut. Tepatnya pada 11 Desember 1948 Belanda menyatakan tidak mungkin lagi melakukan perundingan antara Indonesia dan Belanda.

Indonesia tetap mengupayakan adanya perundingan berikutnya atas pemintaan

[2] Djaja Wahyudi, *PDRI*, Klaten, Cempaka Putih, 2008, hlm.4.

Wakil Presiden Moh. Hatta. Namun, seorang wakil tinggi mahkota Belanda Dr. L.J. Beel justru membentuk pemerintahan interim yang disebut *Bewindvoering Indonesie in Overgangstidj* (Pemerintah Peralihan di Indonesia) yang anggotanya meliputi negara-negara boneka tergabung dalam *Bijeenkomst voor Federaale Overlag*, tanpa keikutsertaan Republik Indonesia. Dr. L.J. Beel menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville pada pukul 23.30 tanggal 18 Desember 1948. Dari pernyataan selang waktu singkat sebelum melakukan agresi maka tidak memberi kemungkinan Indonesia untuk mempersiapkan aksi brutal militer tersebut. Sehingga ini memudahkan dalam melumpuhkan ibu kota Yogyakarta.

Dengan pernyataan tersebut tepatnya pada 19 Desember 1948 Belanda melakukan aksinya dengan pesawat-pesawat Belanda mengadakan manuver di atas Kota Yogyakarta kemudian mengebom pangkalan udara Maguwo (Sekarang lapangan udara Adisutjipto). Lapangan terbang Maguwo dihujani bom oleh lima pesawat Mustang dan Sembilan pesawat *Kittyhawk* pada pukul 05.45. Pada saat itu pula angkatan udara berjumlah 150 orang sempat mengadakan perlawanan karena terbatasnya personel dan persenjataan sehingga tidak mampu mempertahankan lapangan terbang Maguwo. Selain itu, tentara dari Belanda melakukan aksi liciknya seperti memusnahkan stasiun radio dan kantor telekomunikasi, sehingga komunikasi antar wilayah terputus. Belanda beranggapan radio sebagai media dimanfaatkan Soekarno beserta pejabat pemerintahan Republik Indonesia dalam menggerakkan rakyat[3]. Sehingga alat komunikasi pada saat itu diputus dengan tujuan para pemimpin bangsa dan rakyat tidak dapat saling bekerjasama dalam mempertahan kemerdekaan Indonesia.

Padahal pada tanggal 19 Desember 1948 telah dijadwalkan untuk latihan perang-perangan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia untuk persiapan menghadapi Belanda. Sehingga ketika melihat aksi dentuman banyak rakyat yang beranggapan itu sebuah latihan yang dilaksanakan Angkatan Perang Republik Indonesia. Maka rakyat dan tentara Indonesia pada saat itu belum siap ketika Belanda memuntahkan peluru dan bom dari pesawat terbang di Yogyakarta. Sementara setelah bertempur selama 25 menit lapangan Maguwo berhasil diduduki Belanda dan kemudian Panglima Besar Jenderal Soedirman segera mengeluarkan perintah kilatnya. Serta Jenderal Soedirman pula melakukan perbincangan terhadap Soekarno agar presiden dan wakil presiden ke luar kota untuk bergerilya bersama angkatan perang. Namun, presiden dan wakil presiden masih memutuskan untuk tetap di istana kemudian ditawan oleh Belanda, sedangkan Jenderal Soedirman saat itu masih sakit beserta angkatan perangnya malah ke luar kota untuk bergerilya. Dalam situasi tersebut presiden dan wakil presiden yang memilih tetap di istana bermaksud menarik simpati dari dunia luar atas aksi keji yang dilakukan oleh militer Belanda. Hal ini menunjukkan perjuangan yang harus ditempuh berbeda namun tujuannya satu untuk tetap menjaga kesatuan Republik Indonesia.

Alternatif pemerintah setelah ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dengan membentuk pemerintahan di Sumatera Barat tepatnya di Bukittinggi. Bukittinggi dijadikan pusat dalam pemerintahan darurat ini memiliki beberapa alasan: (1) Moh. Hatta telah menyusun kekuatan dan telah melakukan perubahan administrasi; (2) mampu menampung pasukan sebab memiliki daerah yang luas serta wilayah

[3] Rosidi Ajip, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Bandung, Pustaka Jaya, 2011, hlm.177-178.

geografinya pegunungan dan hutan sesuai sebagai medan gerilya; (3) banyak elit politik berasal dari Sumatera Barat sehingga pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang kompeten[4]. Keberadaan PDRI ini segera diketahui oleh pihak Belanda. Akan tetapi,

Belanda baru menguasai Bukittinggi selama tiga hari setelah melalui medan perjalanan yang cukup berat pada 22 Desember 1948. Aksi penyerangan ke Sumatera ini membuat pemerintah dalam menjalankan PDRI dengan gerilya di hutan.

PDRI: Antara Mandat dan Kecerdasan Syafruddin Prawiranegara

Agresi Militer II menyerang ibu kota Yogyakarta dan menduduki Istana Gedung Agung disikapi dengan tanggap dan cermat oleh para pemimpin bangsa yang berada di Yogyakarta, di medan gerilya, maupun di luar Pulau Jawa. Sementara itu, Moh. Hatta sedang melaksanakan rapat kabinet terbatas di Yogyakarta yang dihadiri hanya lima orang menteri sebab sebagian besar telah ke luar kota. Pada rapat terbatas tersebut menghasilkan tiga keputusan antara lain: (1) presiden dan wakil presiden terpaksa tetap berada di dalam kota, sebab ketiadaan pasukan pengawal serta kebutuhan untuk menjalin komunikasi dengan KTN sebagai kepanjangan tangan PBB; (2) Wakil presiden Moh. Hatta merangkap sebagai menteri pertahanan mengumumkan melalui radio kepada tentara dan rakyat untuk bergerilya melawan tentara Belanda; dan (3) presiden dan wakil presiden mengirimkan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi diangkat sementara membentuk pemerintahan darurat, namun mandat tersebut tidak diterima oleh Syafruddin Prawiranegara[5]. Adanya mandat ini menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden berkeinginan untuk menyelematkan kelangsungan negara Indonesia. Mereka telah siap apabila ditawan, namun tetap memastikan tegaknya kesatuan Republik Indonesia dengan mengeluarkan mandat.

Meskipun pada akhirnya Syafruddin Prawiranegara sebagai penerima mandat tersebut tidak tersampaikan padanya, namun beliau mendengar siaran dari berbagai stasiun radio luar negeri yang memberikan informasi secara berulang-ulang kali mengenai jatuhnya ibu kota Yogyakarta serta tertangkapnya presiden dan wakil presiden dan petinggi bangsa lainnya. Beliau timbul perasaan ragu-ragu dalam memimpin Pemerintahan Darurat, karena beliau bukanlah yang paling tua dan tidak memiliki jabatan paling tinggi diantara lainnya. Maka, diadakannya kesepakatan bersama dibentuknya PDRI dipimpin Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua. Penggunaan istilah "ketua" yang tidak sesuai hukum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Meskipun peranan Syafruddin Prawiranegara ini bertanggungjawab sebagai presiden serta merangkap sebagai perdana menteri. Kepemimpinannya dalam situasi perang dituntut memiliki mobilitas yang tinggi dengan berpindah-pindah kedudukannya dalam menghindari serangan lawan sehingga pengambilan keputusan mesti cepat dan tepat.

Keputusan yang dihasilkan menunjukkan visi jauh ke depan dari pemimpin bangsa saat itu meskipun resiko ditangkap, ditawan, maupun diasingkan sudah pasti. Hal itu menunjukkan perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan tidak akan patah hanya ditangkapnya para pemimpin bangsa. Meskipun dalam menjalankan

[4] Meri Desti, *Mengapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Di Bukittinggi (Sumatera Barat)*, Payakumbuh, STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh, 2021, hlm.40-44.
[5] Djaja Wahyudi, *PDRI*, Klaten, Cempaka Putih, 2008, hlm.9.

PDRI mesti bergerilya di hutan. Dalam artian para petinggi PDRI mesti harus berlari dan bersembunyi dari kejaran tentara Belanda dengan membawa pemancar radio serta beberapa perlengkapan. Hal itu mengungkap bahwa Syafruddin Prawiranegara kerap berkomunikasi untuk mengonsolidasi melalui radio dengan para pemimpin Jawa. Sehingga kerjasama antar elit politik terlaksana dan tidak terjadi benturan kepentingan antar masing-masing pihak. Para petinggi PDRI pada masa itu tidak jarang mesti tidur di semak belukar, tepi sungai Batanghari, maupun hutan belantara tengah-tengah Sumatera. Demikian keberadaan PDRI yang penuh perjuangan menuai ejekan dari radio Belanda yang menyebut Pemerintah Dalam Rimba Indonesia. Namun, ejekan tersebut tidak melunturkan semangat para petinggi PDRI yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.

Syafruddin Prawiranegara sebenarnya menjabat sebagai Menteri Kemakmuran yang masa itu mesti menjadi ketua dalam pemerintahan darurat. Situasi dan kondisi masa itu mengharuskan para pemimpin untuk selalu siap siaga menghadapi Belanda. Begitu mendengar berita jatuhnya ibu kota negara di Yogyakarta dan ditawannya para pemimpin bangsa, Syafruddin Prawiranegara segera melakukan kontak dengan Kolonel Hidayat (Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera) pada sore hari tanggal 19 Desember 1948. Beliau berhasil membentuk pemerintahan darurat pada 31 Maret 1948. Adapun susunan kabinet dalam PDRI sebagai berikut:

1. Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan;
2. Soesanto Tirtoprodjo sebagai Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman dan Menteri Pembangunan dan Pemuda;
3. A.A. Maramis sebagai Menteri Luar Negeri (berkedudukan di New Delhi, India);
4. Dr. Soekiman sebagai Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan;
5. Loekman Hakim sebagai Menteri Keuangan;
6. I.J. Kasimo sebagai Menteri Kemakmuran dan Pengawas Makanan Rakyat;
7. K.H. Masjkoer sebagai Menteri Agama;
8. T. Moh. Hasan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan;
9. Ir. Indratjahja sebagai Menteri Perhubungan;
10. Ir. Mananti Sitompoel sebagai Menteri Perburihan dan Sosial.

Dari susunan kabinet yang ada menunjukkan fakta sejarah bahwa Syafruddin Prawiranegara tidak menyalahgunakan mandat pembentukan PDRI. Beliau tidak mengangkat dirinya sebagai Presiden PDRI melainkan hanya sebagai Ketua PDRI[6]. Sikap amanah dalam diri Syafruddin Prawiranegara ini nyata dan patut untuk ditiru oleh berbagai penerus bangsa Indonesia.

Perjalanan Singkat PDRI

Berdasarkan rencana awal dalam rapat kabinet bahwa seluruh kekuatan TNI yang ada di Yogyakarta diperintahkan bergerilya ke luar kota. Maka angkatan perang membagi wilayah pertahanan republik menjadi dua komando yaitu Jawa dan Sumatera dalam melaksanakan rencana di bidang pertahanan untuk pemerintahan. Pembagian

[6] Utami, Septianti Ria, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949,* Kalimantan Barat. Derwati Press, 2018, hlm.98.

wilayah Jawa dan Sumatera ini didasari daerah federal bagian bentukan Van Mook. Wilayah daerah federal seperti Aceh, Bukittinggi, dan Yogyakarta ini menjadi benteng terakhir dalam menyelamatkan Indonesia tetap merdeka. Dalam melaksanakan rencana juga menyiapkan konsepsi baru yang tertuang siasat yang berhasil dalam melawan Belanda di luar Yogyakarta. Hal ini berkaitan mandat yang diterima Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera Barat serta diakui oleh pasukan Republik di seluruh Indonesia. Adapun perintah siasat pada nomor 1 tahun 1948 dengan pokok isi sebagai berikut:

1. tidak melakukan pertahanan yang linier;
2. memperlambat setiap majunya serbuan musuh dan pengungsian total, serta bumi hangus total;
3. membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik yang mempunyai kompleks di beberapa pegunungan;
4. pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal melakukan penyusupan ke belakang garis musuh serta membentuk kantong-kantong sehingga seluruh pulau Jawa menjadi medan gerilya yang luas.

Kemudian siasat ini di Jawa berjalan dengan baik untuk perlawanan terhadap tentara Belanda yang bersenjata ini sesuai harapan dapat berhasil. Sebagai bentuk respon tentara Indonesia ini bergerilya menghadapi Belanda. Saat itu Divisi Siliwangi ini berada di Jawa Tengah bukan di Jawa Barat, akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville. Namun aksi Agresi Militer II sama dengan pelanggaran terhadap Perjanjian Renville. Sehingga membuat 11 Batalyon Divisi Siliwangi melakukan *long march* kembali ke Jawa Barat. Namun, setibanya di Jawa Barat mereka mesti berhadapan dengan DI/TII yang dipimpin Kartosuwiryo. Setelah melaksanakan *long march* selama dua bulan Divisi Siliwangi berhasil menguasai Jawa Barat kembali sesuai yang diharapkan. Dapat dibayangkan bagaimana situasi kacaunya situasi Indonesia pada masa itu yang mesti menghadapi ancaman dari luar dan tantangan dari dalam.

Sementara di Sumatera pula juga mesti melakukan aksi gerilya. Peranan Syafruddin Prawiranegara saat menjalankan pemeritahan darurat yang kerap dicari pemerintahan Belanda untuk dihancurkan. Pemerintahan darurat melakukan perlawanan dengan membentuk lima wilayah pemerintahan militer di Sumatera antara lain: wilayah Aceh dipimpin Gubernur Militer Daud Beureuh, wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur bagian Selatan dipimpin oleh Gubernur Militer dr. Ferdinan Lumban Tobing, wilayah Riau dipimpin oleh Gubernur Militer R.M. Utoyo, wilayah Sumatera Barat dipimpin oleh Gubernur Militer Sultan Muhammad Rasjid bersama Wakil Gubernur Militer Kolonel Dahlan Ibrahim, dan wilayah Sumatera Selatan dipimpin oleh Gubernur Militer dr. Adnan Kapau Gani. Pembentukan lima wilayah pemerintahan militer ini bertujuan sebagai alat bertahan dan melakukan gerakan mobilisasi tentara pemerintahan Belanda sehingga PDRI tetap terlindungi dari serangan musuh sehingga eksistensi Negara Indonesia tetap ada[7].

PDRI tetap eksis di dunia internasional terbukti pada 17 Januari 1949 stasiun radio PDRI berhasil melakukan kontak dengan New Delhi, India. Pemimpin India Pandit Jawaharlal Nehru merupakan tokoh internasional yang sangat peduli dengan

[7] Utami, Septianti Ria, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949,* Kalimantan Barat. Derwati Press, 2018, hlm.97.

perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Belanda, sehingga mensponsori diadakannya Konferensi New Delhi. Syafruddin berkomunikasi dan mengirimkan selamat kepada Pandit Jawaharlal Nehru serta para peserta konferensi New Delhi. Komunikasi melalui stasiuan radio UDO yang diteruskan ke stasiun ZZ Koto Tinggi dan diteruskan lagi ke YJB6. Faktanya, keberadaan stasiun radio YJB6 sangat membantu perjuangan bangsa Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri terutama dalam menyuarakan bahwa pemerintahan Republik Indonesia masih ada. Indonesia dalam pemerintahan kendali Syafruddin Prawiranegara mampu mematahkan propaganda Belanda[8]. Dengan melaksanakan diplomasi internasional yang dilakukan PDRI, keberadaan Indonesia masih diakui oleh berbagai negara lain di dunia.

Atas usaha pemeritahan darurat yang berlangsung sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan Indonesia. Peranan Syafruddin Prawiranegara bersama PDRI di Bukittinggi Sumatera Barat dan *exile government* di India, serta perjuangan L.N. Palar selaku wakil Indonesia di PBB membuat dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada 28 Januari 1949 yang isinya antara lain: (1) mendesak Belanda untuk menghentikan agresi serta meminta gerilyawan Indonesia melakuan genjatan senjata; (2) mendesak Belanda mengembalikan para tawanan politik untuk bisa menjalankan tugas pemerintahan; (3) meminta Belanda dan Indonesia untuk mengadakan perundingan atas dasar Perjanjian Linggarjati dan Renville[9] .

Dari resolusi yang dikeluarkan menunjukkan Belanda berada diposisi terjepit baik di Indonesia maupun dunia internasional, namun buruknya Belanda masih bersikukuh bahwa soal Indonesia hanya berkaitan masalah internal antar keduanya. Belanda dalam menyikapi resolusi tersebut masih berkelit, tapi setelah didesak Amerika Serikat ia baru mau melaksanakan. Mengingat Belanda pada masa itu perekonomiannya terikat dukungan berupa bantuan dari Amerika Serikat. Hal itu mendorong Belanda untuk melakukan perundingan kembali dengan Indonesia. Kegiatan berupa diplomasi diandalkan oleh PDRI di dunia internasional. Belanda sendiri tidak pernah menduga PDRI yang berada dalam hutan Sumatera tetap dapat berkomunikasi dengan wakil-wakil Indonesia yang berada di luar negeri. Sehingga menuai keberhasilan memperoleh pengakuan dari luar bahwa Indonesia ternyata masih ada sedangkan berita propaganda dari Belanda ternyata hanya kebohongan.

Selain aksi diplomasi terdapat serangan umum 1 Maret 1949 sebagai bukti kepada dunia Internasional bahwa negara Indonesia tetap ada. Sebelumnya semangat masyarakat pada akhir Januari 1949 telah melemah, namun setelah mendengar dari radio bahwa Dewan Kemananan PBB pada awal Maret akan membahas persengketaan Indonesia-Belanda. Sehingga api semangat masyarakat meningkat serta bermaksud menarik perhatian dunia bahwa Republik Indonesia masih memiliki kekuatan. Serangan umum berhasil mencapai tujuannya yaitu medukung perjuangan secara diplomasi serta meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya[10]. Dalam penyerangan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dengan membagi komandan *wehrkreise* ketiga yang membawahi daerah Yogyakarta. Serangan yang dilaksanakan di penjuru kota

[8] Djaja Wahyudi, *PDRI*, Klaten, Cempaka Putih, 2008, hlm.21.
[9] Irawan, *Sejarah Diplomasi Indonesia*, Klaten, Cempaka Putih, 2008, hlm.17-18.
[10] Utami, Septianti Ria, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949*, Kalimantan Barat. Derwati Press, 2018, hlm.99.

Yogyakarta, sehingga selama 6 jam TNI berhasil mengepung dan menguasai kembali Yogyakarta.

Syafruddin Prawiranegara selama 207 hari kepemimpinan yang singkat namun memiliki arti penting pada masa itu dalam menentukkan jalannya suatu pemerintahan dalam keadaan darurat. Kiprahnya dalam melakukan gerilya dalam masa revolusi kemerdekaan ini berhasil sehingga memaksa Belanda untuk kembali bernegoisasi. Syafruddin Prawiranegara menjadi ketua dalam PDRI merupakan pilihan yang tepat. Sebab dalam kepemimpinnya untuk PDRI menunjukkan sikap berintegritas, kritis, cekatan, tegas, multi talenta, terbuka, dan bersahaja. Sehingga dalam situasi dan kondisi yang benar-benar panas ini dapat diatasinya dengan tepat sesuai harapan Republik Indonesia. Selain itu, didukung peran serta rakyat Sumatera Barat dan Aceh secara sukarelawan melindungi para pemimpin PDRI, dengan dibuktikkan merelakan rumah maupun kekayaannya untuk mendukung PDRI. Rumah-rumah warga pada masa itu kerap dimanfaatkan sebagai aktivitas pemerintahan, sebab pemerintahan tidak dijalankan dalam sebuah istana. Kegiatan yang demikian luput dari perhatian Belanda dengan menyatunya rakyat dan pemimpin saat ini semakin memperkokoh perjuangan dalam menghadapi aksi Belanda. Serta semakin menumbuhkan rasa nasionalisme antar rakyat Indonesia pada masa itu.

PDRI yang sering terlupakan oleh bangsa ini disebabkan Soekarno sendiri pemberi mandat tidak begitu senang dengan riwayat PDRI. Hal itu sebab mengungkap fakta bahwa dirinya sebagai tawanan Belanda yang sementara vakum tidak menjalankan pemerintahan tersentralisasi dalam pandangan Soekarno. Selain itu pada masa Orde Baru Soeharto pula ada maksud politis sehingga peran PDRI seolah hilang ditelan zaman. Melalui proses yang demikian menghantarkan Akan tetapi, tetap ada upaya mengungkap kembali peran PDRI dalam sejarah yang dilakukan oleh sejarawan. Sehingga PDRI merupakan peristiwa monumental perjuangan yang heroisme rakyat Sumatera Barat dalam membela dan menyelamatkan kesatuan Indonesia maka pemerintah menetapkan tanggal 19 Desember 1948 sebagai hari Bela Negara sesuatu Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006.

Akhir dari PDRI

Genjatan senjata yang dilakukan Belanda pada 31 Desember 1948 di Jawa dan 5 Januari di Sumatera dan bentuk upaya perang gerilya terus berlangsung, mendapat perhatian dari PBB sehingga Belanda menuai himbauan atas aksinya. PBB dan Amerika Serikat mulai melakukan sikap yang tegas terhadap Belanda. Adanya tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan militer Indonesia, akhirnya pada bulan April Belanda sepakat untuk menyerah, namun mendesak untuk mengadakan perbincangan-perbincangan dengan pemerintah Indonesia. Sehingga pada 6 Juli 1949 pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Ditambah lagi atas usaha Pemerintahan Darurat, maka Belanda terpaksa mesti melakukan Perundingan Roem-Roijen[11].

Berakhirnya PDRI ini berkaitan erat dengan perundingan Roem-Roijen. Dalam pengadaan perundingan tersebut nampak peniadaan peran PDRI. Dari Belanda sendiri lebih memilih berunding dengan Soekarno dan Moh. Hatta yang saat itu pula juga masih

[11] Utami, Septianti Ria, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949*, Kalimantan Barat. Derwati Press, 2018, hlm.95-96.

menjadi tawanan Belanda. Sisi tersebut semakin kentara bahwa eksistensi PDRI tidak mendapat pengakuan dari Belanda. Ditambah lagi dari pihak Soekarno dan Moh. Hatta tidak pernah ada usaha untuk menghubungi PDRI terlebih dahulu, ataupun ungkapan pernyataan yang membuktikan bahwa mereka tetap menghargai orang yang mereka amanati. Dalam perundingan tersebut Indonesia diwakili M. Roem yang bersedia melakukan intruksi. Meskipun secara sadar atau tidak, kesediaan M. Roem ini berkaitan keinginan pribadi untuk segera lepas dari tawanan Belanda. Sedangkan wakil delegasi Belanda van Roijen yang telah berkecimpung lama dalam permasalahan yang menyangkut di Indonesia. Dalam perundingan tersebut tokoh-tokoh sedikit mengalami pertentangan dengan delegasi-delegasi Belanda sehingga berdampak pada putusan pengembalian PDRI kepada pemerintahan di Yogyakarta.

Delegasi pelaksanaan perundingan Roem-Roijen ini menimbulkan kontra tersendiri bagi Syafruddin Prawiranegara. Sebab yang menjadi delegasi merupakan M. Roem yang saat itu masih menjadi tawanan Belanda. Sehingga secara hukum M. Roem tidak berhak, namun M. Roem sendiri wakil delegasi pilihan Soekarno dan Moh. Hatta. Hakikatnya dapat menimbulkan keputusan perundingan yang tidak sah. Keputusan Soekarno dan Moh. Hatta yang demikian kurang menghargai keberadaan Syafruddin Prawiranegara pada masa itu yang memimpin PDRI saat Indonesia benar-benar sedang terombang-ambing atas perlakuan Belanda yang ingin berkuasa kembali.

Terjadinya kegiatan diplomasi lagi salah satunya dipengaruhi faktor internal dari Belanda meninggalnya Panglima Militer Belanda Simon H. Spoor yang perannya memprakarsai perebutan kedaulatan Pemerintahan Indonesia. Namun keadaan PDRI mengenai pertahanannya di Sumatera tidak sepenuhnya aman, sebab Belanda berkubu di Bukittinggi berusaha berkali-kali mengusir pasukan Indonesia yang berpangkal di Palupuh. Hal itu kerap terjadi hingga sampai pada penyerahan kedaulatan oleh Belanda ke Republik Indonesia. Pertempuran-pertempuran yang tidak sering terjadi selepas *case fire* sebab gerakannya hanya bertujuan untuk keamanan saja.

PDRI berperan dalam memastikan keberlangsungan Indonesia. Pada 13 Juli 1949 Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, serta sejumlah Menteri kedua Kabinet mengadakan sidang dengan PDRI. Sidang tersebut dalam kepentingan serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi pada 14 Juli 1949 di Jakarta. Dengan adanya putusan tersebut menandai berakhirnya PDRI. Pada masa itu ketua PDRI kurang setuju dengan perjanjian Roem-Roijen hanya berhasil membebaskan Yogyakarta, padahal PDRI menginginkan untuk pemerintah Belanda kembali kepada perjanjian Linggarjati[12]. Jika sesuai dengan perjanjian Linggarjati, maka pihak Belanda harus mengakui Jawa dan Sumatera serta pulau-pulau lainnya sebagai wilayah Republik Indonesia yang bila digabungkan dengan daerah-daerah di Indonesia untuk dijadikan suatu negara baru.

Maka setelah terjadinya perjanjian Roem-Roijen disahkan, maka Natsir meyakinkan Syafruddin Prawiranegara untuk datang dan menyelesaikan dualisme pemerintah yang ada pada saat itu. Situasi yang pertentangan dan dualisme pemerintah segera diselesaikan karena mengancam persatuan nasional. Sebenarnya PDRI secara prinsipiil tidak dapat menerima perjanjian Roem-Roijen, akan tetapi demi kepentingan

[12] Rosidi Ajip, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT, Bandung, Pustaka Jaya, 2011, hlm.203.

perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dan untuk persatuan nasional maka pimpinan PDRI bersedia mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Pengembalian mandat itu mengartikan tanggung jawab perjuangan selanjutnya berada kembali di tangan Presiden Soekarno. Dalam pengembalian mandat Syafruddin Prawiranegara menyampaikan laporan yang telah dilakukan PDRI, kemudian Soekarno menerima kembali mandat sambil mengucapkan terima kasih atas segala usaha PDRI guna kepentingan perjuangan negara. Dengan adanya putusan tersebut menandai pemerintahan selama 6 bulan 21 hari berakhir saat penyerahan mandat dari PDRI ke Moh. Hatta pada tanggal 14 Juli 1948. PDRI telah selasai secara singkat namun mempunyai makna besar sekali karena sangat menentukan jalannya perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia.

SIMPULAN

Pertama, latar belakang PDRI dibentuk pada 22 Desember 1948 sebagai reaksi atas Agresi Militer II yang dilakukan Belanda atas ibu kota Yogyakarta. Pendirian PDRI ini atas dasar menyelamatkan dan mempertahankan proklamasi yang telah diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia. Dalam pemerintahan darurat ini situasi dan kondisi sangat tidak stabil, sehingga pelaksanaan pemerintahan harus bergerilya dan berpindah-pindah maka Bukittinggi, Sumatera Barat menjadi pilihan yang tepat. Kedua, PDRI merupakan antara mandat dan kecerdasan Syafruddin Prawiranegara yang tetap berkomunikasi untuk mengonsolidasi melalui radio dengan para pemimpin Jawa. Sehingga kerjasama antar elit politik terlasana dan tidak terjadi benturan kepentingan antar masing-masing pihak. Ketiga, perjalanan singkat PDRI yang dilaksanakan Syafruddin Prawiranegara dengan menerapkan strategi diplomasi maupun aksi gerilya. Dengan itu Syafruddin Prawiranegara berhasil menahan Belanda tidak dapat memperoleh kemenangan militer. Keempat, akhir dari PDRI berkaitan erat dengan pengadaan Perundingan Roem-Roijen yang membuat pemerintahan kembali ke Yogyakarta. Namun, peniadaan peran PDRI ini membuat Syafruddin Prawiranegara merasa kurang dihargai perjuangannya. Tapi Syafruddin Prawiranegara ini memiliki nasionalisme yang tinggi dengan besar hati ia mengembalikan mandat kepada ke Moh. Hatta pada tanggal 14 Juli 1948 untuk tetap terjalin persatuan dan kesatuan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Djaja, Wahjudi. 2008. *PDRI*. Klaten: Cempaka Putih.

Irawan. 2008. *Sejarah Diplomasi Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.

Meri, Destel. 2021. "Mengapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Di Bukittinggi (Sumatera Barat)." *Jurnal Edukasi* 1(1):38–45.

Rosidi, Ajip. 2011. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Bandung: Pustaka Jaya.

Utami, Septianti Ria. 2018. *Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949*. Kalimantan Barat: CV.Derwati.